



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

LAPORAN SINGKAT

**KOMISI VIII DPR RI (BIDANG AGAMA, SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEBENCANAAN)**

Tahun Sidang	: 2019-2020
Masa Persidangan	: II
Rapat Ke	: 14
Jenis Rapat	: Rapat Dengar Pendapat
Dengan	: Sekjen Kemensos RI, Kepala BPS, Dirjen DUKCAPIL Kemendagri RI
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari, Tanggal	: Kamis, 6 Februari 2020.
Waktu	: Pukul 10.00 WIB.
Tempat	: Ruang Rapat Komisi VIII DPR RI Gedung Nusantara II lantai 1 Jl. Jenderal Gatot Subroto – Jakarta 10270.
Acara	: 1. Pelaksanaan dan Evaluasi Kebijakan dan Program Verifikasi, Validasi dan Data Kemiskinan, Permasalahan dan Alternatif Solusinya.
Ketua Rapat	: TB. Ace Hasan Syadzily, M.Si
Sekretaris Rapat	: Sigit Bawono Prasetyo, S.Sos., M.Si.
Hadir	: 1. 19 dari 26 Anggota Panja Verifikasi Komisi VIII DPR RI. 2. 5 Orang Anggota Komisi VIII DPR RI Izin. 3. Direktur Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Ditjen DUKCAPIL Kemendagri RI. 4. Deputi Bidang Statistik Produksi BPS.

I. PENDAHULUAN:

1. Ketua Rapat membuka Rapat Komisi VIII DPR RI pada pukul 10.48 WIB dan dinyatakan terbuka.
2. Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, DR. H. TB. Ace Hasan Syadzily, sesuai waktu dan tempat acara tersebut di atas.

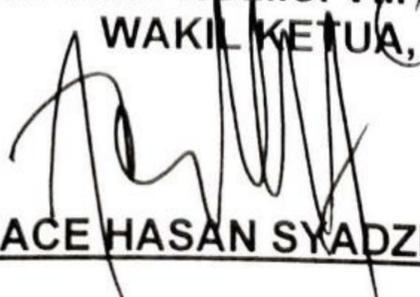
II. CATATAN

Pada Rapat Panja Komisi VIII DPR RI tentang Verifikasi dan Validasi Data Kemiskinan dengan Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri RI dan Kepala Badan Pusat Statistik dengan agenda membahas “**Pelaksanaan dan Evaluasi Kebijakan dan Program Verifikasi, Validasi Data Kemiskinan, Permasalahan dan Alternatif Solusinya**”, disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Panja Komisi VIII DPR RI menerima pemaparan dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri RI dan Badan Pusat Statistik terkait dengan verifikasi dan validasi data kependudukan yang dapat dijadikan sebagai rujukan untuk data kemiskinan.
2. Panja Komisi VIII DPR RI mendorong Ditjen Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri RI dan Badan Pusat Statistik untuk menjamin perlindungan data penduduk agar tidak bocor dan dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang berada di luar kepentingan Negara.
3. Panja Komisi VIII DPR RI mendesak Ditjen Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri dan Badan Pusat Statistik untuk menindaklanjuti pandangan dan pendapat Pimpinan dan Anggota Komisi VIII DPR RI sebagai berikut:
 - a. Meningkatkan koordinasi dengan Kementerian Sosial RI dalam pemutakhiran data kemiskinan sebagai basis data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS).
 - b. Mempercepat perekaman KTP elektronik di daerah-daerah yang belum optimal, terutama di daerah-daerah yang tingkat kemiskinannya tinggi, sebagai basis data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS).

III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 13.27 WIB.

**PIMPINAN KOMISI VIII DPR RI
WAKIL KETUA,**

TB. ACE HASAN SYADZILY, M.Si